

EVALUASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) BANDUNG JUARA DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Elika Dewi Faustine¹, Nyi Raden Ruyani²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pasundan

Email :

elika.dewifsn@gmail.com,

ruyani@unpas.ac.id

Abstrak

Every government either central or regional is often required to always innovate, especially in the activities of qualified public servants. One of them is innovation whose activities are spread across each region in the city of Bandung is the Assessment Information System (SIP) Bandung Juara, which is a program built to assess the performance results of each camat and lurah in public service, the implementation of evaluation is measured based on the results of the activity report uploaded to the SIP Bandung Juara website, camat and lurah evaluation activities have several stages to get the final results of the assessment. The purpose of this research is to analyze and describe the Evaluation of The (SIP) BDG Juara Program in the Governance Section of the Bandung City Regional Secretariat to know, examine more deeply the problems, achievements, as well as the way of the evaluation process in the Bandung Champion SIP Program in carrying out services and identify the advantages of its shortcomings, therefore the focus on the problem is on the evaluation of the program.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are used with litelatur studies, observations, documents and interviews. To measure the evaluation of Program SIP BDG Juara researchers use the Program Evaluation Theory which has indicators Of Evaluation Context, Evaluation Input, Evaluation Process, Evaluation Product (CIPP). This research, has problems in performance has not been maximal, citizen assessment activities are not realized.

Keywords : *Evaluation, SIP Bandung Juara, Service*

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah memulai tatanan baru setelah terbentuknya era reformasi birokrasi, yang menjadi salah satu bentuk untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dapat mengayom juga dapat berdedikasi

sepenuhnya untuk masyarakat, tentu pelayanan publik yang berkualitas harus sesuai dengan standarisasi pelayanan yang telah disusun lalu menjadi acuan dan tolak ukur, namun ,kinerja aparat pelayanan publik Pemerintah Daerah harus dapat dinilai dan di kritik oleh masyarakat berupa

keluhan-keluhan yang terdapat dilapangan, tentu hal itu sangat diperlukan agar dapat mengukur seberapa baik, buruknya, efektifitas, efisiensi nya kinerja tersebut hingga akhirnya dapat di berikan penilaian sampai dengan evaluasi.

Dikatakan oleh Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana (2015), evaluasi suatu proses untuk untuk mengetahui pelaksanaan program yang sedang berjalan dan memonitoring kegiatan agar dapat membantu meningkatkan kualitas program dan mencatat masalah-masalah yang perlu diatasi.

Era modern ini pemerintah di tuntun untuk selalu berinovasi pada hal-hal yang berbasis elektronik, belum lagi masalah situasi dunia saat ini sedang dihadapkan situasi pandemik *Covid-19*, berbagai pelayanan publik tentu sedikit ikut terhambat dan segala kegiatan hal dilakukan dengan mengakses secara *online* atau daring, masyarakat pun harus ikut berperan dan dapat beradaptasi pada setiap kondisi. Hingga beberapa kebijakan publik ikut menyesuaikan keadaan dengan dilaksanakan secara online agar tidak terciptanya saling berkerumun dan harus tetap terlaksana dengan se-efektif mungkin. Namun tentu masih ada saja masyarakat yang tidak paham adanya inovasi atau program lain yang telah diterapkan pemerintah banyak dari kita yang tidak terlalu telaten dalam menggunakan teknologi yang terus berkembang, sehingga penilaian di kalangan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan. Tentu diperlukan upaya yang lebih dalam untuk mengkoordinasikan para aparat nya juga mensosialisasikan setiap program tersebut kepada masyarakat agar terciptanya tujuan dan dapat menjadi Bandung Juara. Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara secara tidak langsung menjadi pengukuran kinerja seberapa baik akuntabilitas sebagai pimpinan di kewilayahan dalam memberikan pelayanan hal tersebut dapat berpengaruh untuk terwujudnya *good governance*.

Seperti pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung saat masih dibawah pimpinan Ridwan Kamil, terciptanya inovasi program berbasis penilaian digital yaitu Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara pada tahun 2015, SIP Bandung Juara merupakan Sistem Informasi Penilaian elektronik berbasis internet pada penilaian kinerja camat dan lurah dengan periode satu tahun. Program tersebut menjadi salah satu tolak ukur evaluasi kualitas kinerja di kewilayahan, yaitu oleh camat dan lurah dengan melakukan kinerja dalam menyelenggarakan pembangunan terkait peningkatan pelayanan publik, yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung 036 tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah Nomor 1354 Tahun 2014 tentang penilaian kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung, tetapi seiring perkembangannya terbit Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 yaitu tentang Kecamatan (dalam peraturan Wali Kota Bandung 036 tahun 2019).

Penilaian tersebut dilakukan oleh tim penilai dan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam memberikan penilaian dan memantau atas hasil kinerja pelayan publik yang dilakukan oleh Aparat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung secara *online* yang bisa di akses melalui website. Pada tahun 2014-2015 publik dapat ikut serta menilai dan mengakses, tentu program tersebut menjadi wadah terciptanya transparansi, ramah, aman, dan seberapa akuntabel aparat itu menjalankan tugas nya dalam pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun penilaian oleh masyarakat belum terlaksanan sepenuhnya karena hasil penilaian yang dilakukan warga belum tau akan masuk pada proses penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 036 tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah.

Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara tentu penilaian dilakukan secara online namun tetap ada survey lapangan serta ada hasil pemaparan.

Program ini diimplementasikan dengan akses para camat dan lurah dengan mengunggah profil wilayah, hasil kegiatan dan data dalam bentuk laporan bulanan hingga tahunan dan hasilnya akan dievaluasi. Faktanya hasil evaluasi di laporan dengan memaparkan predikat hasil akhir setelah memiliki beberapa tahap digolongkan dengan 3 (tiga) camat dan 3 (tiga) lurah terbaik berdasarkan kualifikasi yang sudah ditetapkan dan dilihat berdasarkan *Review* Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara, walaupun seluruh Kewilayah Daerah Kota Bandung terdapat 30 kecamatan dan 151 kelurahan juga para camat lurah akan menerima rapor dari hasil akhir kinerja dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan bahwa pokok permasalahan menggambarkan Program Sistem informasi penilaian (SIP) Bandung Juara belum terlaksana dengan sepenuhnya khususnya bagi warga dan para camat dan lurah belum sepenuhnya maksimal melaksanakan akuntabilitasnya dalam pelayanan publik. Bahwa hal inilah yang menjadi permasalahan peneliti tertarik dan memfokuskan penelitian pada “Evaluasi Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas maka peneliti membuat rumusan masalah “Bagaimanakah Evaluasi Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara yang dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung?”

tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan Evaluasi Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara yang dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Administrasi dalam arti sempit sering diartikan dengan kegiatan tata usaha yaitu yang berkaitan dengan pengarsipan, mencatat atau dikenal dengan *clerical work* (Kammaruddin Sellang 2016:6). Namun menurut Silalahi yang dikutip dalam Lina Marlani (2019), administrasi dalam arti luas dapat diartikan dengan kegiatan yang biasa dilakukan orang atau sekelompok manusia sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan, berkerjasama secara teratur dan tertuju sesuai dengan pembagian tugas masing-masing yang telah disepakati bersama.

Secara universal administrasi publik adalah suatu proses yang saling berkaitan dengan kegiatan kebijakan-kebijakan pemerintah, diarahkan pada teknik-teknik yang jumlahnya tak terhingga, dengan memberikan arahan dan maksud terhadap beberapa orang, (dalam Yenchilia Danamik, 2016).

Kegiatan administrasi itu merupakan salah satu proses keputusan dalam mencapai tujuan kebijakan publik, kebijakan publik itu merupakan sebuah ketetapan, segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh aparat pemerintahan itu sendiri, kebijakan itu harus dapat dilakukan dan pula bermanfaat bagi kehidupan bersama, harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan memiliki manfaat besar untuk warganya dan tidak menimbulkan kerugian, makadari itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Kamal Alamsyah, 2016: 23). Dengan itu rangkaian kegiatan kebijakan berdasarkan pada cara kerja, sumber daya, dan hubungan yang terkait pada pelaksanaan (dalam Abdullah Ramdhani, 2017), namun jika kebijakan tanpa pelaksanaan atau tidak diimplementasi di lapangan kebijakan yang telah dirancang akan menjadi sia-sia kemudian menjadi sebuah pemborosan anggaran.

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya, Islamy dalam Kamal Alamsyal (2016: 48-50) mengemukakan proses dalam pemutusan

kebijakan publik, diantaranya:

1. Perumusan Masalah
Artinya dengan pemahaman *problem* dapat membantu menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi menentukan penyebab masalah hingga dapat memetakan tujuan untuk dirancang ulang menjadi kebijakan baru.
2. Agenda Kebijakan
Artinya dengan timbulnya masalah-masalah akan menyebabkan perhatian pemuat kebijakan membawa dampak munculnya agenda kebijakan.
3. Pemilihan Alternatif kebijakan Untuk Memecahkan Masalah
perumusan untuk menentukan pemecahan masalah dalam kebijakan.
4. Tahap Penetapan Kebijakan
Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penetapan kebijakan setelah melalui beberapa alternatif yang digunakan sebagai pemecahan masalah.

Namun dalam setiap kebijakan pemerintah diperlukan evaluasi dalam setiap pelaksanaannya apakah menguntungkan publik atau tidak. Evaluasi kebijakan bermaksud dengan tujuan untuk menentukan hal strategis yang direncanakan dalam meningkatkan kinerja kebijakan, evaluasi dilaksanakan oleh evaluator sesuai dengan prosedur yang dapat bertanggung jawab tanpa menimbulkan kekusaran. Evaluasi kebijakan ini mencakup atas implemetasi di lingkungan dan kinerja kebijakan, (Nugroho dalam kutipan Debby Kawengian, 2015).

Mengetahui evaluasi sebagai kegiatan pengambilan keputusan, Arikunto dan Jabar (2009: 3) dalam Ashiong P Munthe (2015) menyatakan, maka program sebagai unit atau satu kesatuan dimana terjadinya proses realisasi dan implementasi dari kebijakan suatu organisasi yang berkesinambungan dengan apa yang terjadi dan dibutuhkan bersama melibatkan sekelompok orang.

Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tujuan evaluasi program dalam Muhammad Firyal (2016), bertujuan untuk dapat mengukur pengaruh program tersebut bagi masyarakat, program dilakukan sebagai pelayanan di tengah sosial yang diharapkan penyelesaian masalah atau situasi masyarakat.

Proses pemecahan masalah pada penelitian ini tentu diperlukan analisis secara dan perlu ditelusuri secara mendalam dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang digunakan memperoleh beberapa tahap yaitu model evaluasi meliputi Evaluasi Context (evaluasi konteks), Evaluasi Input (evaluasi masukan), Evaluasi Process (evaluasi proses), Evaluasi Product (evaluasi produk/hasil) (CIPP). Berikut merupakan skema kerangka berpikir penelitian yang telah di paparkan sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menelaah lebih mendalam terhadap kendala atau masalah, capain, juga cara penilaian atau proses evaluasi pada program SIP Bandung Juara dalam melaksanakan pelayanan, menganalisis dan mendeskripsikan mengetahui, melaksanakan pelayanan dan mengidentifikasi kelebihan juga kekurangannya, sehingga penelitian ini memiliki fokus pada evaluasi program. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil yaitu Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Seperti yang dikutip Bogdan dan Taylor (1992:21) bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dengan menghasilkan data dengan deskriptif dapat berupa diskusi, catat-mencatat, perilaku atau tingkah laku orang-orang yang akan diamati, dengan itu memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang kenyataan berdasarkan proses berpikir deduktif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan

data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung tanpa perantara yaitu seperti melakukan wawancara dan observasi langsung kepada instansi.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan memperoleh data-data dari dokumen, jurnal.

Teknik pengumpulan data lainnya seperti penelitian kepustakaan merupakan penelitian menggunakan pengumpulan studi informasi dan data oleh berbagai sumber yaitu bersumber dari dokumen, majalah, koran, buku, ataupun sejarah penelitian terdahulu, dengan melakukan pengamatan pada fenomena secara ilmiah pada keadaan lingkungan yang akan diteliti. Diantaranya beberapa teknik penelitian pengumpulan data di lapangan dan melakukan observasi dan diakhiri dengan dokumentasi.

Informan penelitian ialah objek yang penting ditunjuk berdasarkan tujuan dan tentu pertimbangan informan penelitian harus menekuni bidang hingga informasi yang relevan di dapat selengkap-lengkapny tentang Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu:

1. Staf Sub Bagian Kewilayahan, yang memegang dan ikut menilai, paham, memiliki pengetahuan pada Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara.
2. Bendahara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung
3. Warga yang telah menerima penilaian di kecamatan

Tabel 3.1

Tabel Operasional Parameter

Variabel	Indikator	Parameter	Sumber Data
Evaluasi Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara	1. <i>Evaluasi context</i> (evaluasi konteks),	Mencakup analisis keadaan lingkungan, atau tim penilai lembaga pemerintah kewilayahan, tujuan program tujuan yang akan dicapai	Staff Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung-
	2. <i>Evaluasi input</i> (evaluasi masukan)	Cakupan sumber daya manusia, sarana-peralatan pendukung, sumber dana (anggaran) kegiatan, manfaat program SIP Bandung Juara	Staff Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung – dan Warga di Kewilayahan Kota Bandung
	3. <i>Evaluasi process</i> (evaluasi proses)	Proses rancangan program, pelaksanaan program, siapa, kapan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program.	
	4. <i>Evaluasi product</i> (evaluasi produk/hasil).	Ketercapaian keberhasilna, konteks, masukan, kelebihan dan kelemahan, serta dampak jangka panjang	

Sumber : Hasil Olahan Peneliti berdasarkan teori Stufflebeam dan Shinkfield, 2021

Analisis data yang gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan model dari Miles dan Huberman (1994) yang memiliki tiga tahapan, diantaranya:

1. Reduksi Data

Proses reduksi yaitu mendapatkan dan mengumpulkan data dengan menjawab pertanyaan dari masalah yang diteliti sesuai pada keadaan di lokasi hingga dilakukan secara wawancara, diskusi dari sumber yang ingin peneliti ambil sehingga menjawab pertanyaan peneliti.

2. Penyajian Data

Proses ini yaitu data yang dipilih dan dikumpulkan atas informasi yang di dapatkan hasil wawancara, diskusi dengan pegawai atau staff sehingga akan menjadi analisis data informasi yang dapat disimpulkan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dari hasil temuan reduksi data dan penyajian data yang akan menjadi gambaran objek yang di teliti menjadi memiliki suatu gambaran yang jelas dari sebelumnya, namun tetap hasilnya masih bersifat sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memaparkan dan menganalisa pada hasil penelitian yang telah ditelaah peneliti yaitu mengenai Evaluasi Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Bagian Tata Pemerintahan merupakan salah satu perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam meng-koordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Tata Pemerintahan dan salah satunya memegang Program Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara.

SIP Bandung Juara merupakan salah satu terobosan pembangunan Pemerintahan Kota Bandung dalam inovasi E-Governance, yaitu:

1. Menjadi sarana pelaksanaan penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan
2. Serta sebagai sarana pelaporan kegiatan camat dan lurah,
3. Seraya melalui tahap evaluasi dan mereview hasil kinerja di lingkup kewilayahan oleh camat dan lurah.

Dari hasil kinerja setiap camat dan lurah yang telah di upload ke Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara, tim penilai dapat melihat dan mengevaluasi perolehan kerja sudah terlaksana dengan maksimal atau belum, tentu tim penilai akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan kebenaran di lapangan dan dilakukan pemaparan oleh setiap camat dan lurahnya.

1. *Evaluasi Context (evaluasi konteks)*

Evaluasi konteks ini yaitu dapat digambarkan pada aspek analisis pada keadaan lingkungan atau aspek yang dapat dinilai melalui survei dalam menentukan masalah di SIP Bandung Juara, evaluasi konteks menggambarkan aspek tujuan program dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja agar mencapai tujuan dapat tercapai.

Tujuan Program SIP Bandung

Juara penilaian di tingkat kewilayahan Kota Bandung, yaitu dapat menimbang dan mengevaluasi kinerja camat dan lurah demi memenuhi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan dapat menilai terhadap kondisi yang ditemukan atas setiap kegiatan pemerintahan bagi kecamatan dan kelurahan

2. *Evaluasi Input (evaluasi masukan)*

Artinya evaluasi masukan ini meliputi tentang cakupan sumber, sarana-prasarana pendukung, *alternative* hingga sumber dana atau anggaran setiap kegiatan, lalu manfaat-manfaat dari program itu, juga masukan dari publik dalam menerima pelayanan.

Secara keseluruhan kegiatan yang sudah telaksana tentu didukung oleh sarana-prasarananya, yaitu salah satunya dibutuhkan anggaran. Pada setiap hasil kegiatan camat dan lurah tentu memerlukan dana atau anggaran dalam pelaksanaannya yang sudah ditetapkan di Peraturan Wali Kota No. 036 tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah pada Bab VII pasal 10 tentang Pembiayaan. Pada hasil wawancara anggaran kegiatan SIP Bandung Juara yang dilaksanakan oleh camat dan lurah.

Namun Adapula masukan hasil wawancara selanjutnya peneliti melakukan interview tentang aktivitas proses pemenuhan kegiatan pelayanan dari salah satu warga terhadap kegiatan pelayanan di kecamatan yang diterimanya, yaitu oleh ibu Senny Nursalamah di Kecamatan Cibenyng, beliau mengatakan:

“Kadang kalo misal butuh tanda tangan dari Lurah atau Camat itu suka lama, alesannya itu seperti Camat atau Lurahnya belum ada dikantor, padahal udah jam kerjanya. Logikanya saja jika ada rapat atau kesibukan lain bisa bertutur jadi warganya tidak perlu menunggu, sedangkan ini kadang suka tidak jelas disuruh nunggu-nunggu lama”.

3. *Evaluasi Process (evaluasi proses)*

Evaluasi proses ini adalah dari hasil proses rancangan program, hingga pelaksanaan-

pelaksanaan program, proses pada pengumpulan data dan tim pelaksana, kapan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap pelaksanaan program.

Rancangan tahapan proses bagaimana penilaian Program SIP Bandung Juara ternyata memiliki beberapa tahap hingga dapat menentukan hasil akhir dari evaluasi camat dan lurah. Didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor. 036 tahun 2019 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah pasal 6 ayat (6) menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja camat dan lurah sebagai berikut pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Tahapan pelaksanaan akhir evaluasi Camat Dan Lurah tahun 202



Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021, 2021

4. *Evaluasi Product* (evaluasi produk/hasil)

Dari kegiatan pelayanan publik, berdasarkan dari hasil wawancara selaku staff di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung oleh Bapak **Handika Devara** selaku yang memegang dan ikut melakukan penilaian SIP Bandung Juara beliau mengatakan:

“Aktivitas penilaian pelayanan dalam web program SIP pada tahun 2014-2015 sesungguhnya masyarakat dapat berpartisipasi ikut menilai dan memberikan pendapat atas hasil kerja camat dan lurah, walaupun kala itu partisipannya memang sedikit, sebab masih banyak warga yang tidak tahu program tersebut.

Namun sekarang kegiatan penilaian pelayanan pada web SIP Bandung Juara warga tidak ikut berperan lagi dalam penilaian karena memang hasil penilaian yang dilakukan publik itu tidak tahu harus ter-rekap pada poin penilaian yang mana makadari kegiatan penilaian oleh warga itu sudah tidak berjalan”.

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada Bapak **Handika Devara Janitra** di Kantor Bagian Tata Pemerintahan mengenai kekurangan pada program SIP Bandung Juara beliau mengatakan:

“Terdapat juga kendala lain namun yaitu dari sistem nya, kendala tiap admin berbeda beda sesuai porsir kerjanya masing-masing karena dalam kapasitas karena di dalam SIP Bandung Juara terdapat foto dan dokumen-dokumen yang dilaporkan oleh 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan setiap bulannya akibatnya sistem penyimpanan yang cepat penuh, server yang kurang stabil dikarenakan banyaknya sistem informasi yang terintegrasi di Diskominfo.

Perolehan dari yang sudah dijelaskan proses penilaian atau pengevaluasi, dapat dibuktikan berdasarkan ranking dari observasi hasil akhir kinerja camat dan lurah terbaik yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1

Form Penilaian Hasil Akhir Evaluasi Kinerja 10 Kelurahan Terbaik Dan 10 Kecamatan Terbaik

NO	KELURAHAN	NO	KECAMATAN
1	Sukawarna	1	Bandung Wetan
2	Gumuruh	2	Cicendo
3	Sukamiskin	3	Babakan Ciparay
4	Cigadung	4	Sukajadi
5	Derwati	5	Cinambo
6	Cibangkong	6	Bojongloa Kidul
7	Husein Sastranegara	7	Buahbatu
8	Babakan Ciparay	8	Batununggal
9	Lebak Siliwangi	9	Antapani
10	Turangga	10	Sumur Bandung

Sumber: Hasil Laporan Evaluasi akhir

Setiap camat dan lurah wajib mengupload hasil kegiatan dan kinerjanya pada Web SIP Bandung Juara sebagai fasilitas penilaian dan menjadi bahan evaluasi yang disajikan dalam bentuk bukti-bukti real berupa foto, file dokumen, link dan lain-lain. Pada tiap laporan kegiatan mejadi bukti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain dengan tujuan mengayomi, melayani warga dalam kegiatan pelayanan publik, memaksimalkan setiap fasilitas umum, lingkungan setiap kewilayahannya di Kota Bandung.

Tentu pada SIP Bandung Juara keseluruhan kegiatan dan tugas sudah memiliki porsi masing-masing dalam penilaiannya dan dalam hasil penilaiannya melalui web SIP BDG Juara seluruhnya dituangkan ke dalam lembar diarsipkan ke dalam rapor setiap masing-masing camat dan lurah, setiap rapor memiliki 3 (tiga) kategori penilaian yakni:

- Rapor hijau (kinerja baik),
- Rapor kuning (kinerja cukup)
- Rapor merah (kinerja kurang).

IV. KESIMPULAN

Evaluasi Program Sistem Informasi (SIP) Bandung Juara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu meliputi:

Kegiatan evaluasi memiliki empat tahap yaitu tahap penilaian SIP Bandung Juara dalam penilaian bulanan dan nilai tahunan, tahap survey lapangan, tahap nilai pemaparan, dan tahap nilai kebijakan, masing-masing memiliki bobot dalam aspek penilaiannya hingga ditetapkan hasil final evaluasi kinerja camat dan lurah dari hasil kebijakan peraturan Wali Kota yaitu dengan hasil 3 (tiga) camat terbaik dan 3 (tiga) lurah terbaik tentu yang memiliki penilaian terbaik mendapatkan reward. Kegiatan evaluasi penilaian dilakukan oleh

beberapa tim penilai. Lalu seluruh camat dan lurah akan menerima raport hasil kinerja selama periode satu tahun dengan keterangan penilaiannya yaitu berkinerja baik. Implementasi SIP Bandung Juara merupakan salah satu inovasi e-governance dalam hal penilaian hasil kinerja di kewilayahan yaitu Camat dan Lurah, pada dasarnya program tersebut memudahkan kegiatan pemerintahan di kewilayahan dalam melaksanakan evaluasi hasil kinerja pada camat dan lurah.

Walaupun didukung oleh penerapan teknologi, Program evaluasi SIP Bandung Juara masih memiliki masalah diantaranya masih tersedapat hasil kinerja penilaian camat dan lurah yang belum mencapai hasil yang maksimal lalu masih terdapat masalah pada servernya, pula situasi saat ini sedang pandemic Covid-19 sehingga beberapa kegiatan di lapangan akan sedikit terhambat. Kendala lain nya yaitu pada penilaian warga pada web SIP Bandung Juara sekarang tidak dilaksanakan disebabkan hasil penilaian warga yang tidak tahu akan masuk pada point penilaian yang mana sehingga penilaian warga belum menjadi suatu indikator untuk mengukur hasil kinerja setiap camat dan lurah serta masih banyak warga yang tidak tahu dan kurang paham akan program tersebut, sebab kurang optimalnya sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Cet I, Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Mukarom, Zaenal & Muhibudin Wijaya Laksana, (2015). Manajemen Pelayanan Publik, Jilid 1, Cet I, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Akbar, Muhammad Firyal. (2018). "Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo)". Aristo Jurnal Analisis Pelayanan Publik, (2018)
- Sellang, Kammaruddin (2016). Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara

Teori

Kebijakan dan Aplikasinya, Jilid I, Yogyakarta : Penerbit Ombak

Bogdan dan Taylor, “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif”, Digilib Unimed (2002).

Damanik, Yenchilia Tresna, Marom AUFARUL, “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2016

Kawengian, Debby D. “Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Utara, Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi”. *Acta Diurna*, IV, 1, 2011

Munthe, Asiong. “Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat”. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), (2015)

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 036 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Camat Dan Lurah, Bandung: Peraturan Wali Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung No. 8 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bandung: Peraturan Wali Kota Bandung Handika Devara Janitra, Wawancara Pribadi, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung, 15 September 2021